

POLA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM

Lili Nurindah Sari
Lilinurindah1509@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the communication patterns used by the North Lombok government for natural disaster preparedness and the obstacles in conducting public communication. This research is a qualitative research with case study method. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. Determination of informants was carried out using purposive sampling technique. The results of the analysis in this study found from a series of public communication processes for natural disaster preparedness carried out by the North Lombok Regency government there were actors and public communication networks involving many parties. The communication pattern formed from the communication process is a circular communication pattern. In addition to circular communication patterns, there are other communication patterns that are also used, namely primary, secondary and linear communication patterns. In addition, the communication barriers faced in public communication for natural disaster preparedness in North Lombok are technical barriers and semantic barriers.

Keywords: Public communication, disaster communication, natural disaster preparedness, communication patterns, communication barriers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pola komunikasi yang digunakan pemerintah Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam serta hambatan dalam melakukan komunikasi publik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan dari serangkaian proses komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara terdapat aktor dan jejaring komunikasi publik yang melibatkan banyak pihak. Pola komunikasi yang terbentuk dari proses komunikasi tersebut adalah pola komunikasi sirkuler. Selain pola komunikasi sirkuler terdapat pola komunikasi lain yang juga digunakan yakni pola komunikasi primer, sekunder dan linear. Selain itu hambatan komunikasi yang dihadapi dalam komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara adalah hambatan teknis dan hambatan semantik.

Keywords : Komunikasi publik, Komunikasi bencana, kesiapsiagaan bencana alam, pola komunikasi, hambatan komunikasi.

Pendahuluan

Komunikasi publik diperlukan pemerintah ketika hendak menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh publik, salah satunya adalah perihal kebencanaan. Dengan komunikasi publik pemerintah menyampaikan informasi dan mengedukasi publik terkait risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi sehingga publik dapat siap siaga dalam menghadapi bencana tersebut (Johnston, Taylor & Ryan. 2020). Komunikasi memegang peran yang penting dalam setiap lini kehidupan dan tidak dapat lepas dari keseharian manusia. Dalam kebencanaan komunikasi juga memegang peran yang krusial sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Haddow & Haddow (dalam Hendra,. Rudianto & Priadi. 2015) dimana dalam menunjang keberhasilan rangkaian tahapan upaya penanggulangan bencana mulai dari mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan pasca bencana, komunikasi menjadi inti dari pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kerap dilanda bencana baik bencana geologi maupun hidrometeorologi. Tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana masuk ke posisi ke-38 dari total 181 negara lainnya di dunia, hal ini berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Institute for International Law of Peace and Armed Conflict* atau IFHV di tahun 2021 silam. Tidak hanya IFHV, *world bank* di tahun yang sama juga merilis data yang menunjukkan posisi Indonesia berada di urutan ke-12 dari 35 negara lainnya sebagai negara yang rawan terhadap bencana (Anggraeni, 2021).

Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terkena dampak paling parah akibat gempa bumi yang terjadi di tahun 2018 silam. Melansir situs BNPB data per tanggal 13 Agustus 2018 menunjukkan korban meninggal dunia di Lombok Utara akibat gempa tersebut mencapai 347 jiwa dengan korban luka-luka sebanyak 640 orang. Parahnya dampak gempa Lombok yang terjadi tahun 2018 di kabupaten Lombok Utara menjadi pukulan berat bagi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kekuatan gempa yang besar telah menimbulkan banyak kerugian baik moral maupun materil. Hingga saat ini upaya-upaya pemulihan masih terus berlanjut. Belajar dari pengalaman gempa bumi di tahun 2018 silam, pemerintah Kabupaten Lombok Utara tentu tidak ingin risiko atau kerugian yang pernah dialami terulang lagi. Sebagai wilayah wilayah rawan bencana pemerintah Lombok Utara tentu tidak ingin bencana yang sama atau berbeda menyebabkan kerusakan yang sama seperti akibat gempa 2018 silam. Ancaman bencana di Kabupaten Lombok Utara tidak hanya gempa bumi tetapi terdapat sejumlah ancaman bencana alam lainnya di wilayah tersebut. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) 2021-2025 Kabupaten Lombok Utara memiliki 11 ancaman bencana. Hal ini tentu memerlukan adanya komunikasi publik yang efektif untuk membangun kesiapsiagaan di wilayah tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Lombok Utara serta hambatan dalam melakukan komunikasi publik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek di dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. pola komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam, komunikasi yang dilakukan masing-masing instansi dengan pihak-pihak yang berkaitan serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi bencana tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2022 - Februari 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yakni dimulai dari melakukan pengumpulan data lalu mereduksi data, menyajikan hingga akhirnya melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang disajikan. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi teknik dan sumber.

Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil wilayah

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdiri pada tahun 2008 tepatnya yakni pada tanggal 21 Juli yang sampai saat ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya wilayah Lombok Utara adalah bagian dari Kabupaten Lombok Barat, hingga akhirnya mekar di tahun 2008. Saat ini wilayah Lombok Utara terdiri dari 5 kecamatan yakni, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara terletak di wilayah Tanjung. Kabupaten Lombok Utara di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok tengah.

Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah 809, 53 Km² dengan kecamatan terluas yakni Bayan, dengan luas mencapai 329,1 Km² atau 40,65% dari luas wilayah Lombok Utara secara keseluruhan, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok Utara pada tahun 2021 adalah 251.451 jiwa yang tersebar di 43 desa.

b. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara atau disingkat BPBD merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam hal penanggulangan bencana yang dibentuk oleh Bupati atas koordinasi

maupun konsultasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB pusat sesuai dengan peraturan presiden tentang BNPB. Berikut adalah ringkasan tugas dan fungsi BPBD berdasarkan peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Lombok Utara :

1. Kepala BPBD
2. Sekretariat Badan
3. Subbagian Program Dan Keuangan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian
5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Seksi Pencegahan Bencana
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
6. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - c. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana
 - d. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

c. Profil Kebencanaan Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang rawan bencana. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Lombok Utara tahun 2021-2025 terdapat 11 ancaman bencana yang tersebar di berbagai wilayah di Lombok Utara. Ancaman bencana tersebut terdiri dari bencana geologi, hidrometeorologi dan biologis.

Tabel. 1.1. Jenis-jenis ancaman bencana di Lombok Utara

No.	Jenis Ancaman Bencana
1.	Gempa bumi
2.	Tsunami
3.	Erupsi Gunungapi
4.	Banjir
5.	Banjir Bandang
6.	Longsor
7.	Kekeringan
8.	Cuaca Ekstrim
9.	Kebakaran Hutan dan Lahan
10.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit

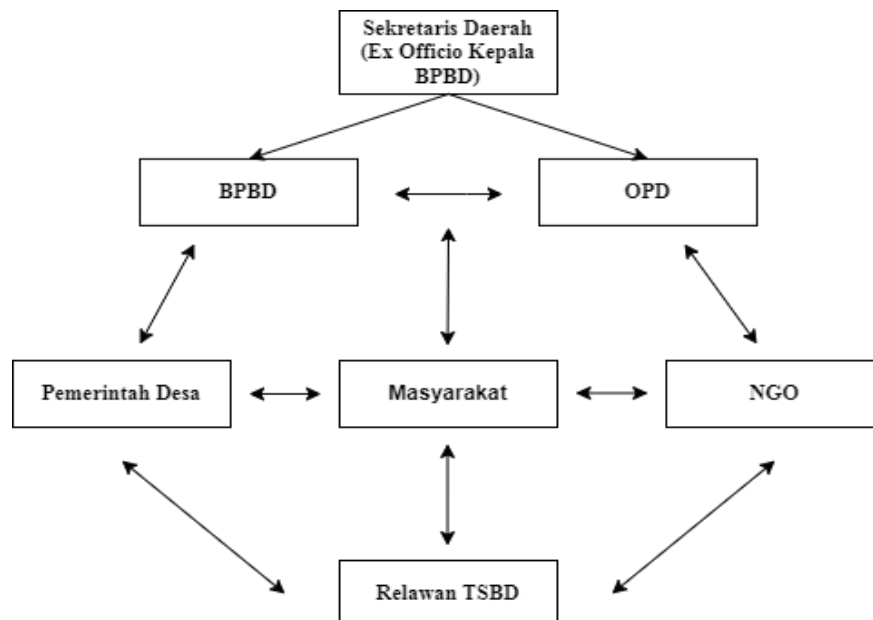
Berdasarkan dokumen KRB Kabupaten Lombok Utara (2021-2025), terjadi penambahan jumlah ancaman bencana di Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya KRB 2011 mencatat hanya 9 ancaman bencana di Lombok Utara. Adanya penambahan jumlah ancaman ini kemudian dikaji setiap risikonya di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai dokumen Kajian Risiko Bencana.

Wilayah Lombok Utara rawan terhadap bencana geologi maupun non geologi. Hal ini karena Lombok Utara terletak di bawah kaki Gunung Rinjani, selain itu terdapat patahan aktif sesar Flores yang berada di dalam laut dan membentang dari Utara Pulau Flores hingga utara Pulau Lombok. Sesar Flores menjadi penyebab gempa-gempa berkekuatan sedang maupun kuat yang kerap terjadi di wilayah Lombok dan sekitarnya dari rentang tahun 2014-2018 (Syafitri, 2019). Salah satu bencana Geologi yakni gempa bumi berkekuatan 7.0 SR yang terjadi di tahun 2018 lalu telah menimbulkan trauma yang mendalam di Kabupaten Lombok Utara. Wilayah ini menjadi Kabupaten dengan dampak terparah di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya gempa bumi, sejumlah bencana non geologi lainnya yang rawan terjadi adalah longsor dan banjir. Berdasarkan dokumen KRB (2021-2025) Lombok Utara, hal ini karena wilayah Lombok Utara memiliki wilayah pedataran yang lebih sedikit dibanding perbukitan dengan lereng yang terjal sampai miring.

2. Implementasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam

a. Aktor dan Jejaring Komunikasi Publik untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam

Melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Lombok Utara tidak dapat hanya dilakukan oleh BPBD selaku pihak yang bertanggung jawab dalam urusan kebencanaan, tetapi membutuhkan banyak keterlibatan dari berbagai pihak baik dari lingkup pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa hingga lembaga non pemerintahan. Bagan dibawah menunjukkan gambaran aktor dan jejaring komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara.



Bagan. 2.1. Aktor dan jejaring komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara

Bagan 2.1 menunjukkan aktor dan jejaring komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara. Pada bagan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah pihak yang terlibat dan mengambil peran dalam proses komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara. BPBD selaku badan yang bertanggung jawab dalam urusan kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan upaya membangun kesiapsiagaan bencana alam tentunya melakukan komunikasi atau koordinasi dengan perangkat daerah terkait di Kabupaten Lombok Utara. Terdapat hubungan antar badan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, salah satunya yakni dalam urusan kebencanaan. Selain melakukan komunikasi atau koordinasi dengan sesama lembaga pemerintahan BPBD juga melakukan kolaborasi dengan lembaga non pemerintahan seperti *Non Government Organization* dan relawan atau komunitas masyarakat yang ada di desa. terlihat bahwa secara umum jejaring komunikasi publik yang dilakukan tidak berlangsung secara satu arah atau linear. Pada bagan 2.1 terlihat adanya jejaring komunikasi dua arah yang terjadi secara terus menerus. BPBD sebagai aktor yang menyampaikan pesan kemudian juga menerima umpan balik dari sejumlah pihak yang terlibat dalam jejaring komunikasi tersebut. Komunikasi terjadi secara dua arah antara komunikator dan komunikan, komunikator dapat menjadi komunikan dan begitu pun sebaliknya, komunikasi terjadi secara dua arah dan berlangsung terus menerus (Schramm dalam Sujanto, 2021).

b. Komunikasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam

Pada fase sebelum bencana kegiatan komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, seperti diseminasi pengetahuan terkait ancaman bencana dampak yang ditimbulkan hingga bagaimana bertindak saat bencana tersebut terjadi (Fauzi & Marhamah, 2020). Untuk menyampaikan informasi tersebut salah satu hal yang dilakukan BPBD Lombok Utara adalah melakukan komunikasi publik. Tidak hanya BPBD, perangkat daerah terkait serta lembaga pemerintahan lingkup desa juga melakukan hal yang sama, yakni komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam. Dari wawancara yang sudah dilakukan, terdapat beberapa perangkat daerah selain BPBD yang juga melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana yang sejalan dengan program perangkat daerah tersebut seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Utara dalam hal kesiapsiagaan bencana memang tidak begitu banyak melakukan tindakan preventif secara langsung akan tetapi dinas kesehatan Kabupaten Lombok Utara dalam hal kebencanaan tidak hanya bekerja sama lintas bidang atau program tetapi juga lintas sektor seperti dengan BPBD, pemerintah desa dan juga NGO. Sebagai upaya kesiapsiagaan bencana, Dinas kesehatan sendiri memiliki tim siaga bencana yang terdiri dari setiap bidang di dinas kesehatan, yang akan siap bergerak ketika terjadinya bencana (Wawancara, 20 Desember 2022). Selain kegiatan dari dalam dinas sendiri, dalam upaya kesiapsiagaan bencana alam dinas kesehatan juga turut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh NGO (*Non Government Organization*), seperti kegiatan FGD dan juga menjadi

Narasumber dalam kegiatan yang dilakukan NGO untuk mitigasi bencana di desa dampingan NGO tersebut

Selain dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal kesiapsiagaan bencana alam khususnya yang berhubungan dengan bencana akibat perubahan iklim melakukan berbagai upaya untuk membangun kesiapsiagaan bencana alam. Upaya yang dilakukan tersebut seperti melakukan koordinasi lintas perangkat daerah sebagai upaya membangun komitmen bersama untuk sinergitas dalam hal kebencanaan. Selain itu dinas LHK juga melakukan sejumlah kegiatan untuk kesiapsiagaan bencana akibat perubahan iklim dengan turun ke masyarakat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok petani, kelompok pecinta alam, kelompok nelayan dan sebagainya ” (Wawancara, 19 Desember 2022).

Adapun Dinas sosial dalam upaya kesiapsiagaan bencana melakukan beberapa hal, seperti koordinasi data dan logistik untuk kebencanaan terutama dengan BPBD sebagai *leading sector* dalam masalah kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu upaya peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) juga dilakukan. Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan relawan TAGANA dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin selaku sub koordinator perlindungan dan penjaminan sosial bidang Rehsos Dinas sosial Kabupaten Lombok Utara bahwa, bahwa bentuk kegiatan mitigasi yang dilakukan dinas sosial adalah lebih kepada peningkatan kapasitas atau pelatihan relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). TAGANA merupakan relawan yang berada di bawah naungan dinas sosial yang tidak hanya turun bergerak ketika terjadi bencana saja, tetapi juga turut andil untuk kegiatan mitigasi bencana melalui program “TAGANA masuk sekolah” (Wawancara, 19 Desember 2022).

Komunikasi serta koordinasi yang dilakukan antar perangkat daerah terkait di Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam merupakan bagian dari komunikasi pada fase pra bencana. Berbagai program yang dimiliki setiap instansi dalam hal kesiapsiagaan bencana ini merupakan kegiatan yang tentunya sejalan dengan upaya membangun kesiapsiagaan bencana alam yang dilakukan oleh BPBD selaku *leading sector* dalam penanggulangan bencana di Lombok Utara, sehingga terjalin komunikasi lintas sektor yang kemudian membentuk pola komunikasi.

3. Partisipasi Publik Dalam Komunikasi Publik untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara

a. Peran Non Government Organization

Pada proses komunikasi biasanya akan muncul *feedback* atau umpan balik yang diberikan komunikan kepada komunikator. Adanya umpan balik dari kegiatan komunikasi dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan atau efektifnya komunikasi yang dilakukan (Effendy dalam Riadi & Suyianto, 2020). Ramadani (2019) Menjelaskan bahwa komunikasi publik memiliki 5 karakteristik, dua diantaranya adalah melayani publik dengan informasi terkait kebijakan pemerintah yang sedang, akan dan sudah dilaksanakan dan

melibatkan publik dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah.

Partisipasi publik untuk ikut serta dalam upaya membangun ketangguhan bencana di Lombok Utara dapat terlihat dari keterlibatan publik seperti NGO. Melalui program yang diinisiasi oleh NGO di Kabupaten Lombok Utara dengan mengundang sejumlah perwakilan dari masing-masing instansi sebagai upaya bersama di Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi wilayah yang tangguh bencana. Instansi diajak untuk memasukkan unsur-unsur kebencanaan di dalam setiap perencanaan yang dibuat. Dalam merumuskan suatu dokumen atau program yang akan dilakukan oleh NGO yang akan berprogram di Kabupaten Lombok Utara terkait kebencanaan beberapa instansi terkait turut terlibat dalam memberikan masukan-masukan sehingga program yang dijalankan benar-benar sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di tahun ini terdapat dua Desa di Kabupaten Lombok Utara yang masih menjadi dampingan dari NGO perihal ketangguhan bencana diantaranya yakni Desa Pemenang barat dan Desa Malaka di kecamatan Pemenang. Kedua desa ini merupakan DESTANA. Selama melakukan program di tahun kedua, desa mendapat dampingan dari Konsorsium KONSEPSI atas kerja sama dengan Program SIAP SIAGA (kemitraan pemerintah Indonesia-Australia). Konsorsium KONSEPSI banyak mendorong kedua desa ini dalam hal penguatan secara kelembagaan dan menjembatani terbentuknya sejumlah dokumen kebencanaan di tingkat desa. Dokumen yang dihasilkan di tingkat desa ini disusun tidak hanya mengandalkan pihak NGO atau perangkat daerah terkait tetapi juga dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat di desa tersebut, seperti Tim Siaga Bencana Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, perwakilan disabilitas, dan sejumlah perwakilan masyarakat lainnya di desa tersebut melalui kegiatan FGD (Focus Group Discussion). Hasil FGD inilah yang kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan dokumen seperti KRB, Renkon maupun peta sebaran bencana yang kemudian menjadi pedoman dalam melakukan pengurangan risiko bencana atau pun dalam hal kesiapsiagaan dan kondisi darurat bencana.

Setelah proses di level desa Konsorsium KONSEPSI sebagai penyelenggara program tentu menginginkan adanya keberlanjutan dari program membangun ketangguhan di desa yang sudah mereka laksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Konsorsium KONSEPSI mengusahakan adanya penyalarsan program yang dilaksanakan di desa dengan agenda pemerintah Kabupaten .

Dapat disimpulkan bahwa NGO banyak berperan dalam mendorong terjadinya kesepahaman untuk menghadirkan program-program penanggulangan bencana di Lombok Utara. Sebagai publik yang aktif terhadap isu kebencanaan NGO yang terlibat dalam jejaring komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara pola komunikasi yang dilakukan NGO tidak hanya kepada BPBD atau instansi terkait tetapi juga kepada lingkup pemerintahan terkecil yakni desa.

b. Peran Desa

Membangun kesadaran khususnya dalam upaya preventif penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara memerlukan kerja sama multipihak untuk membentuk suatu ekosistem komunikasi publik sehingga terciptanya kesadaran akan bencana ke seluruh lapisan masyarakat, hingga pada lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap bencana. Dengan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) desa dituntut untuk mandiri dalam hal kebencanaan. Hampir di setiap Destana di Kabupaten Lombok Utara saat ini memiliki relawan yang secara kelembagaan berada di bawah naungan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh desa. Pembentukan Relawan TSBD (Tim Siaga Bencana Desa) merupakan salah satu bentuk keseriusan desa dalam membentuk ketangguhan di desa mereka. TSBD terdiri dari masyarakat desa yang sebagian besar kaum milenial. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan generasi muda terkait pentingnya kesadaran akan bencana di desa mereka.

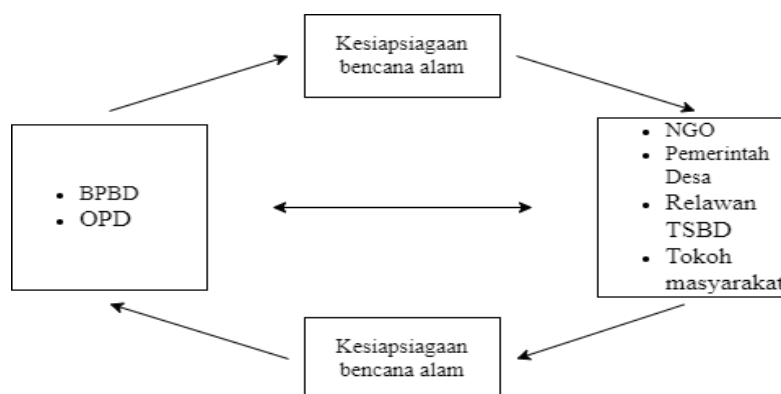
Pemerintah Desa yang berperan sebagai penanggung jawab sekaligus penasihat dari relawan TSBD. Komunikasi dalam penyampaian informasi terkait kebencanaan di kedua desa tersebut dilakukan secara langsung maupun menggunakan media. Berbagai upaya yang dilakukan TSBD seperti yang dilakukan Oleh TSBD pemenang Barat, Mereka melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam secara langsung maupun menggunakan media. Komunikasi publik secara langsung dilakukan melalui sosialisasi dengan mengumpulkan warga dan juga secara *door to door*. Sosialisasi mitigasi bencana dengan mengumpulkan warga di satu tempat dilakukan untuk masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan khusus, sedangkan sosialisasi *door to door* dilakukan kepada masyarakat disabilitas di desa tersebut. Selain melakukan penyampaian informasi secara langsung, TSBD pemenang Barat maupun TSBD Malaka juga melakukan penyampaian informasi melalui media sosial yang dimiliki hal ini bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan bencana.

Dalam upaya pelaksanaan program pemerintah desa lebih banyak melibatkan pemuda untuk banyak bergerak akan tetapi hal ini tidak mengesampingkan peran dari tokoh masyarakat, dimana tokoh-tokoh masyarakat dan para tetua di desa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan FGD untuk membuat dokumen kebencanaan di Desa. Para tokoh-tokoh masyarakat di dalam FGD dapat memberikan masukan mereka, seperti pada pengetahuan yang dimiliki terkait desa mereka termasuk kearifan lokal untuk mitigasi bencana di Desa. Selain itu tokoh masyarakat dan para tetua juga berperan dalam memberikan saran dan nasihat bagi desa maupun relawan TSBD dalam bertindak.

Berbicara mengenai kearifan lokal di desa, BPBD dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana juga kerap menekankan adanya penguatan kearifan lokal di desa sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana (Wawancara, 01 Desember 2022). Setiap desa tentu memiliki kearifan lokalnya masing-masing, kearifan lokal untuk mitigasi bencana ini dapat berbentuk cerita, nyanyian, bentuk bangunan rumah hingga pada pertanda alam, sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk pengurangan risiko bencana di Desa.

4. Pola Komunikasi Publik untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara

Komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Lombok Utara tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam lingkup komunikasi publik untuk kesiapsiagaan di Lombok Utara terdapat sejumlah pihak yang terlibat dan berkaitan antar satu dengan yang lainnya sehingga membentuk pola komunikasi seperti pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pola komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Lombok Utara

Dari gambar tersebut dapat dilihat, bahwasanya pola komunikasi yang terbentuk dari serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan membentuk pola komunikasi sirkuler. Masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi publik tersebut saling bergantian menjadi komunikator dan komunikan sebagaimana teori komunikasi sirkuler yang dijelaskan oleh Schramm (dalam Hasibuan, 2019). Pola komunikasi sirkuler dalam komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara terbentuk dari serangkaian aktivitas komunikasi yang dilakukan. BPBD selaku *leading sector* dalam urusan kebencanaan di Lombok Utara melakukan encoding dan menyampaikan pesan kepada publik, hingga akhirnya pesan tersebut di decoding dan publik ini kemudian memberikan tanggapan yang kemudian menjadi umpan balik/*feedback* bagi BPBD. Tidak berhenti disitu, proses komunikasi terus berlanjut antara BPBD, instansi terkait, publik maupun stakeholder sehingga akhirnya membentuk pola komunikasi sirkuler. Pada proses komunikasi pemerintah Lombok utara untuk kesiapsiagaan bencana alam pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut secara bergantian menjadi komunikator maupun komunikan. Hal tersebut terjadi terus-menerus secara sirkuler.

Terdapat pola-pola komunikasi lainnya yang dilakukan oleh BPBD maupun pemerintah Desa dalam melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam. Berikut beberapa pola komunikasi yang diterapkan di Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam :

1) Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan penyampaian pesan yang dilakukan komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media (Cangara dalam Trihapsari., & Inah. 2016). Lambang atau

simbol dalam komunikasi primer terdapat dua yakni, lambang verbal dan non verbal. Dalam melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara BPBD mengaplikasikan model atau pola komunikasi primer, dimana penggunaan pola komunikasi primer dapat dilihat dari adanya pemasangan rambu evakuasi, rambu petunjuk, dan papan peringatan di berbagai tempat di Kabupaten Lombok Utara.

2) Pola Komunikasi Sekunder

Dalam melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam tentu tidak hanya dapat dilakukan melalui pesan-pesan yang disampaikan melalui simbol atau lambang, sehingga untuk menggapai masyarakat yang lebih luas BPBD menggunakan media kedua dalam menyampaikan informasi yakni melalui media sosial. Media sosial ini merupakan KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagai bentuk upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat tentang bencana alam di Lombok Utara. Selain media sosial, media lainnya yang digunakan adalah Whatsapp. Penggunaan Whatsapp grup ini tidak hanya di lingkungan BPBD saja, tetapi terdapat juga Whatsapp grup yang terdiri dari seluruh pimpinan dari setiap perangkat daerah di Lombok Utara sehingga melalui Whatsapp grup tersebut informasi disebar.

Selain itu di tingkat desa sendiri seperti di Desa Pemenang Barat dan Malaka penggunaan media sosial sebagai media dalam penyampaian informasi juga dilakukan, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Berbagai macam informasi salah satunya untuk kesiapsiagaan bencana alam juga dimuat di dalam media sosial tersebut, sehingga masyarakat desa maupun di luar desa dapat mengetahui informasi perihal kebencanaan melalui media sosial.

3) Pola Komunikasi Linear

Selain pola komunikasi primer dan sekunder dalam melakukan komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam BPBD melalui program sekolah aman bencana, peningkatan kapasitas dan sosialisasi perihal kesiapsiagaan bencana juga dilakukan menggunakan pola komunikasi linear. Melalui program sekolah aman bencana yang dilakukan oleh BPBD, sasaran yang dituju tidak hanya murid sekolah, tetapi juga para guru maupun pegawai di sekolah tersebut. Selain sosialisasi, kegiatan pada sekolah aman bencana yang dilakukan adalah simulasi bencana di sekolah.

Selain sekolah aman bencana BPBD juga melakukan peningkatan kapasitas di Desa terutama pada relawan yang ada di Desa. Di tingkat desa sendiri seperti yang dilakukan di Desa Pemenang Barat dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat desa juga menerapkan pola komunikasi linear seperti pada kegiatan sosialisasi untuk kesiapsiagaan bencana.

5. Hambatan Komunikasi Publik untuk Kesiapsiagaan Bencana Alam Di Kabupaten Lombok Utara

Hambatan dalam komunikasi merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya distorsi terhadap pesan yang disampaikan sehingga menghalangi penerima dalam menerima pesan tersebut (Alfi & Saputro, 2018). Hambatan

dalam komunikasi tidak merupakan makna yang dimaksudkan untuk disampaikan oleh pengirim pesan (Sujanto, 2021) Terdapat 2 hambatan komunikasi yang dihadapi dalam komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana alam di Lombok Utara, berikut adalah penjelasannya.

1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis merupakan hambatan yang terjadi karena adanya kerusakan alat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Untuk melakukan komunikasi publik terkait kesiapsiagaan bencana di Lombok Utara salah satu hambatan yang dihadapi adalah hambatan teknis, dimana alat-alat komunikasi banyak mengalami kerusakan akibat bencana gempa di tahun 2018 yang merobohkan gedung BPBD.

2. Hambatan semantik

Hambatan semantik merupakan hambatan dalam proses komunikasi, dimana terjadinya kesalahan penafsiran makna oleh komunikan dari isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. West (dalam Sujanto, 2021) menjelaskan bahwasanya hambatan semantik terjadi karena penyampaian pesan oleh komunikator yang tidak dapat dipahami oleh komunikan. Hambatan semantik yang dalam komunikasi publik untuk kesiapsiagaan bencana dalam hal ini adalah seperti kekeliruan penafsiran makna pada rambu-rambu petunjuk evakuasi bencana yang dipasang di beberapa tempat yang belum sesuai standar. Hal ini dapat membingungkan karena tidak ada informasi tambahan yang dapat memperjelas rambu-rambu yang dipasang, sehingga terjadi kesalahan dan menimbulkan kebingungan dalam memaknai rambu-rambu tersebut.



Gambar. 5.1



Gambar. 5.2

Gambar 5.1 dan 5.2 tersebut menunjukkan perbandingan antara rambu yang sesuai standar dan tidak. Pada gambar 5.2 terlihat jelas simbol atau lambang yang menunjukkan ancaman bencana, sehingga arah evakuasi

menjadi lebih jelas. Sedangkan pada gambar 5.1 tidak terdapat simbol atau lambang ancaman bencana yang jelas sehingga arah evakuasi tidak jelas terkait evakuasi terhadap ancaman bencana apa. Ketika simbol ancaman bencana tidak disertakan sebagai informasi tambahan di dalam rambu evakuasi maka arah evakuasi menjadi membingungkan. Arah panah pada rambu evakuasi yang ada di lapangan memiliki arah yang beragam, sehingga dengan menambahkan simbol ancaman bencana pada rambu evakuasi akan memperjelas arah pada saat evakuasi dari masing-masing ancaman bencana yang diwakili oleh rambu evakuasi tersebut dan ketika terjadi bencana maka arah evakuasi menjadi jelas, kemana harus menyelamatkan diri dari ancaman bencana sesuai arahan rambu-rambu evakuasi yang ada.

Simpulan

Pola komunikasi yang digunakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam adalah pola komunikasi sirkuler. Hal ini terlihat pada adanya serangkaian proses komunikasi yang melibatkan banyak pihak selain BPBD dan OPD yakni, NGO, pemerintah desa, Relawan TSBD dan Masyarakat. Selain pola komunikasi sirkuler, terdapat pola komunikasi lain yang juga digunakan yakni, penggunaan pola komunikasi primer melalui pemasangan papan petunjuk, rambu evakuasi dan papan peringatan bencana. Penggunaan pola komunikasi sekunder dengan cara menyampaikan informasi kesiapsiagaan bencana alam menggunakan media sosial dan whatsapp grup dan penggunaan komunikasi linear dengan melakukan sosialisasi sekolah aman bencana dan peningkatan kapasitas di desa.

Hambatan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk kesiapsiagaan bencana alam adalah hambatan teknis dan semantik. Hambatan teknis terjadi karena adanya kerusakan alat-alat komunikasi. Adapun hambatan semantik terjadi karena, adanya perbedaan pemaknaan dari rambu-rambu evakuasi yang terpasang di beberapa tempat di Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- Sujanto. (2021). *Pengantar Public Relation di Era 4.0 Teori Konsep dan Kasus Terkini*, Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS

Skripsi

- Syafitri, Y. (2019). *Analisis pergeseran lempeng bumi yang meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi di pulau Lombok* (Doctoral dissertation, UIN Mataram). <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1880> (diakses pada 28 Agustus 2022)

Jurnal online

- Alfi, I., & Saputro, D. R. (2018). Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 193-210. <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i2.1397> (diakses pada 20/01/2023)
- Fauzi, F., & Marhamah, M. (2020). Pola komunikasi bencana dan media dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Pekommas*, 5(2), 133-142. <http://karya.brin.go.id/id/eprint/14239> (diakses pada 26/001/2023)
- Hasibuan. (2019). Komunikasi Sirkuler. *Jurnal network media*, 2(1), 49-57. <https://doi.org/10.46576/jnm.v2i1.448> (diakses pada 26/01/2023)
- Johnston, K. A., Taylor, M., & Ryan, B. (2020). Emergency management communication: The paradox of the positive in public communication for preparedness. *Public Relations Review*, 46(2), 101903. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101903> (diakses pada 29 Agustus 2022)
- Ramadani, T. (2019). Pengelolaan Komunikasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 11-27. https://www.researchgate.net/publication/335403587_Pengelolaan_Komunikasi_Publik (diakses pada 29 Agustus 2022)
- Riadi, S., & Sunyianto, S. (2020). Efektivitas Komunikasi dalam Pendidikan STIPAP Medan ditinjau dari Hambatan Komunikasi. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 4(2), 121-130. <http://dx.doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8063> (diakses pada 4/02/2023)
- Trihapsari, M., & Inah, E. N. (2016). Pola Komunikasi Interpersonal Kepala Madrasah Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 9(2), 156-179. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v9i2.519> (diakses pada 22 September 2022)

Lainnya

- Anggraeni, R. (2021). *Bank Dunia Sebut Indonesia Peringkat ke-12 Sering Terkena Bencana*. <https://economy.ane.com/read/2021/01/22/320/2349065/bank->

dunia-sebut-indonesia-peringkat-ke-12-sering-terkena-bencana_(diakses pada 13 Agustus 2022)

BNPB. (2018). Dampak Gempa Lombok : 436 Orang Meninggal dan Kerugian Ekonomi Lebih Dari 5.04 Trilyun Rupiah. <https://bnpb.go.id/berita/dampak-gempa-lombok-436-orang>

BPBD Lombok Utara, Dkk. (2021). Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara.

BPS Kabupaten Lombok Utara. (2022). Kabupaten Lombok Utara dalam Angka 2022.

<https://lombokutarakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/c7b0f9f3e37d8c1424f05f1d/kabupaten-lombok-utara-dalam-angka-2022.html> (diakses pada 14/01/2023)

Hendra, Y., Rudianto, R., & Priadi, R. (2018). Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi Bencana. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/25/0> (diakses pada 17 Agustus 2022)

IFHV. (2021). *World Risk report 2021 : focus Social protection* <https://www.ifhv.de/publications/world-risk-report> (diakses pada 24 September 2022)

<https://ntb.bpk.go.id/kabupaten-lombok-utara/> (diakses pada 14/01/2023)

<https://portal.lombokutarakab.go.id/#> (diakses pada 14/01/2023)